

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM  
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN  
RESTORAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

**S K R I P S I**



**CITRA FANI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
2017**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM  
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN  
RESTORAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

**S K R I P S I**

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh  
Gelara Serjana Ilmu Administrasi Negara*

**OLEH**

**CITRA FANI  
1265141007**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

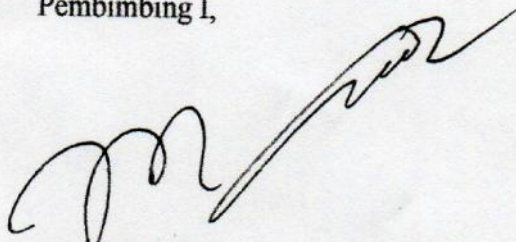
Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan Surat Persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Nomor: 4660/UN36.6/DL/2017, tanggal 16 Agustus 2016, untuk membimbing Saudara:

Nama : Citra Fani  
NomorStambuk : 1265141007  
ProgramStudi : IlmuAdministrasi Negara  
JudulSkripsi : Faktor-Faktor yang Berperan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara.

Menyatakan bahwa Laporan Hasil Penelitian ini telah diperiksa dan dapat diuji di depan Panitia Ujian Hasil Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

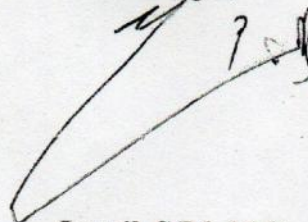
Makassar, Juni 2017

Pembimbing I,



**Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si**  
Nip. 19601231 198803 1 011

Pembimbing II,



**Ismail, S.Pd, M.Si**  
Nip. 19790909 2010121 0004

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan No. 5242/UN36.6/KM/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017.

Ditahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Makassar



Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum.  
NIP. 19671231 199303 1 016

Panitia Ujian :

- |                  |                                      |         |
|------------------|--------------------------------------|---------|
| 1. Ketua         | : Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum. | (.....) |
| 2. Sekretaris    | : Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si.   | (.....) |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si.      | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : Ismail, S.Pd., M.Si.               | (.....) |
| 5. Penguji I     | : Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si.   | (.....) |
| 6. Penguji II    | : Dr. Risma Niswaty, M.Si.           | (.....) |

## FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan:

Nama : Citra Fani  
NIM : 1265141007  
Tempat, Tanggal Lahir : Rorre, 16 Februari 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Berperan Dalam Optimalisasi  
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten  
Toraja Utara.

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
2. Ismail, S.Pd., M.Si

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur jiplakan/plagiat. Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut di dalam/luar pengadilan dan menanggung segala resiko yang diakibatkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Juni 2017

Diketahui Oleh:

Ketua Prog. Studi Ilmu Adm. Negara

  
**Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si**  
NIP. 19801231 198803 1 011

Membuat Pernyataan

  
**Citra Fani**  
NIM. 1265141007

## MOTTO

*Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun dibawah langit ada waktunya. **la membuat segala sesuatu indah pada waktunya**, bahkan la memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.*

**(Penghotbah 3 : 1,11)**

***“Bersukacitalah Senantiasa, Tetaplah Berdoa Dan Mengucap Syukurlah dalam Segala Hal”***

*Kupersembahkan Karya sederhana ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta serta keluarga besarku atas segala kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tulus selama ini*

## **ABSTRAK**

Citra Fani. 2012. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Guntur dan Ismail.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara dilihat dari kejelasan dan kepastian peraturan pajak, tingkat intelektualitas masyarakat, kualitas aparat pajak dan sistem administrasi perpajakan yang tepat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara baik itu objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 dan Perda Kabupaten Toraja Utara No. 2 tahun 2011, namun tingkat pengetahuan masyarakat akan peraturan pajak itu masih sangat minim dikarenakan kurangnya sosialisasi dari fiskus pajak. Selain itu kualitas aparat pajak yang sudah baik dilihat dari tingkat pendidikan, adanya training dan pelatihan serta penilaian masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

## **KATA PENGANTAR**

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala Hikmat, Kemampuan dan BerkatNya yang senantiasa di Anugerahkan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar dengan judul: Faktor-faktor yang berperan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas; Bab I yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian, Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual, Bab III berisi metode penelitian yang menguraikan jenis dan desain penelitian, fokus dan deskripsi fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian dan keabsahan data, Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan dan Bab V berisi kesimpulan dan saran.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Secara khusus penulis berterima kasih kepada kedua orang tua penulis. Untuk Ayahanda Lewi Sule dan Ibunda Ludia Kala' Tiku yang telah menjadi orang tua yang hebat dan luar biasa yang selalu memberikan cinta kasih, nasehat, motivasi dan support, baik itu secara moril, materi, terlebih dukungan doa yang selalu dipanjatkan buat penulis. Untuk kakak-kakak dan adik penulis, terima



kasih buat cinta kasih, semangat, dukungan dan doa yang dipanjatkan untuk kesuksesan penulis, kiranya Tuhan Yesus Memberkati. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, kepada:

1. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP Rektor Universitas Negeri Makassar.
2. Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
3. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar, yang juga selaku Pembimbing I yang dengan segala kesabaran, ketekunan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar.
5. Ismail S.Pd, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran, ketekunan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si selaku Penguji I dan Dr. Risma Niswaty, S.S, M.Si selaku Penguji II yang telah menuntun dan memberi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Drs. Firdaus Rin Bata, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara serta Yunus Sumule, SE

selaku Kepala seksi Penagihan dan seluruh pegawai dan staf atas kesediaanya memberikan informasi dan data guna penelitian skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku Andi Alfisa Nur, S.AP., Fatimah Khumairah, S.AP., Suci F. Ramdhani S.AP terima kasih karena selalu setia mendukung, memotivasi dan membantu penulis. Terima kasih juga buat teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar buat kebersamaan dalam keluarga HIMAGARA selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar.
10. Teman-teman *Youth Master Kingdom Community* terima kasih buat kebersamaan, sukacita, motivasi, terlebih dukungan doa yang tak terhitung buat penulis selama ini. *We are youth, we are best friend, we are partner and we are family in Christ. Master Kingdom, Touching Heaven Changing Earth.* Juga buat *Efrata Youth Family*, terima kasih buat semangat, motivasi dan dukungan doa yang selalu dikirimkan bagi penulis selama menuntut ilmu di Makassar.
11. Terima Kasih juga kepada Bapak/Ibu Gembala, Diaken dan Diakonis, teman-teman pelayan dan seluruh Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hope yang sudah menjadi keluarga bagi penulis selama menuntut ilmu, dan selalu memberi sukacita, semangat, motivasi dan dukungan doa bagi penulis.
12. Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk melayani, menambah ilmu, pengalaman, dan kebersamaan dalam suatu organisasi.

13. *Mom* Nitha yang sudah menjadi mama bagi penulis selama berada di Makassar terima kasih buat semangat, motivasi, nasehat dan dukungan bagi penulis. Tuhan Yesus Memberkati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena adanya keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun penulis terima dengan kerendahan hati dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua, saudara-saudari, keluarga dan semua pihak yang sudah mendukung baik itu secara moril maupun secara materi serta doa bagi penulis.

Semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang memerlukannya.GBU

Makassar, April 2017

Penulis,

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT KETERANGAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
<b>A. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Konsep Optimalisasi Penerimaan Pajak.....	8
2. Konsep Pajak Daerah.....	14
3. Pengertian Pajak Hotel dan Restoran.....	19
<b>B. KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>24</b>

### BAB III METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
2. Lokasi Penelitian.....	26
3. Tahap-Tahap Penelitian.....	27
4. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
5. Sumber Data Penelitian.....	28
6. Instrumen Penelitian.....	29
7. Prosedur Pengumpulan Data.....	30
8. Pengecekan Keabsahan Data.....	31
9. Analisis Data.....	32

### BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan.....	58

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	67
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009-2014.	5
2.	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009-2014.	5
3.	Banyaknya Hotel dan Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2010-2014	6
4.	Jumlah Pegawai DPPKAD Kabupaten Toraja Utara Menurut Golongan	53
5.	Jumlah Pegawai DPPKAD Kabupaten Toraja Utara Menurut Tingkat Pendidikan	53
6.	Jumlah Pegawai DPPKAD Kabupaten Toraja Utara Menurut Diklat Perjenjangan	54

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Skema Kerangka Konseptual	25

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Matriks Penelitian	70
2.	Pedoman Wawancara	72
3.	Matriks Pedoman Wawancara	74
4.	Daftar Nama Informan	77
5.	Matriks Data Hasil Wawancara	79
6.	Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 dan Perda Kab. Toraja Utara No 2 Tahun 2011	90
7.	Peta Jabatan DPPKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2015	100
8.	Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2015	101
9.	Daftar Hotel/ Wisma di Kabupaten Toraja Utara	102
10.	Persentase Tingkat Penghuni Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel dan Bulan di Kabupaten Toraja Utara	104
11.	Daftar Restoran/Café/Rumah Makan di Kab. Toraja Utara	105
12.	Contoh STTPD Hotel dan Restoran di Kab. Toraja Utara	108
13.	Usul Judul Skripsi	112
14.	Persetujuan Judul dan Calon Pembimbing	113
15.	Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing	114
16.	Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian	115
17.	Surat Izin Penelitian	116



18.	Rekomendasi penelitian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toraja Utara.	117
19.	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	118
20.	Dokumentasi	119
21.	Riwayat Hidup	122

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, baik itu pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah. Oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah.

Pembangunan daerah merupakan salah satu wujud dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Diberlakukannya otonomi daerah secara efektif pada 1 Januari 2001 dengan ditandai penerbitan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dilakukan penyempurnaan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, merupakan bukti bahwa setiap daerah diharapkan mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu perlu upaya serius yang harus dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya dalam melaksanakan tugas, kewajiban, serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Oleh karena itu setiap daerah

memiliki kebijakan keuangan sendiri yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara garis besar mengatur tentang sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang dimaksud dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.<sup>1</sup>

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian daerah khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pentingnya PAD dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah.

Adapun salah satu PAD yang mempunyai potensi dan kontribusi yang besar berasal dari Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang sumber-sumber pendapatan setiap daerah otonom baik untuk tingkat propinsi maupun kabupaten /kota. Untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, pasal 5.

tingkat Kabupaten/kota, jenis pajak yang dapat di pungut menurut UU Nomor 28 tahun 2009 yaitu Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung wallet, Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan atas tanah dan bangunan.<sup>2</sup>

Kabupaten Toraja Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja yang resmi di bentuk pada tanggal 26 November 2008 berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara. Sebagai Kabupaten yang baru dibentuk, optimalisasi dari berbagai sektor penerimaan mutlak dilakukan untuk mendukung proses pembangunan daerah serta pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintahan salah satunya yaitu optimalisasi pada penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

Penelitian sebelumnya menyangkut masalah hotel dan restoran pernah diangkat oleh Ria Paongan (2011) dengan judul “Optimalisasi Penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Tana Toraja” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah di Kab. Tana Toraja dan sejauhmana pemanfaatan potensi yang ada untuk meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran di Kab. Tana Toraja. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa Kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja Masih Jauh dari Target yang diharapkan karena pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sitem dan prosedur yang ada. Selain itu jumlah petugas

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2.

pemungut pajak, tingkat pengetahuan dan pemahaman petugas terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak masih kurang, Begitupula dengan sarana dan prasarana kurang mendukung kelancaran pemungutan.<sup>3</sup>

Selanjutnya penelitian kedua dilakukan oleh Panca Ambawa Sumule (2014) dengan judul “ Peranan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara “. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Hasil dari penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. Hal ini terbukti dari nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,976, artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah.<sup>4</sup>

Realisasi penerimaan pajak hotel kabupaten Toraja Utara tahun 2009-2014 seperti yang di sajikan dalam table (lihat tabel I) di bawah. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target yang dianggarkan. Kemudian pada tahun 2010 sampai tahun 2013 penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang di anggarkan. Dan pada tahun 2014 penerimaan pajak hotel kembali melebihi target yang di anggarkan.

---

<sup>3</sup>Ria Paongan. 2011. *Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Toraja Utara*. Makassar: Universitas Hasanuddin, hal 78

<sup>4</sup> Panca Ambawa Sumule. 2014. *Peranan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Toraja Utara*. Makassar: Universitas Hasanuddin

**Tabel 1. Realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Toraja Utara**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2009	199,500,000.00	249,509,380.00	<b>125.067%</b>
2010	350,500,000.00	287,875,022.00	<b>82.132%</b>
2011	745,000,000.00	459,441,905.00	<b>61.670%</b>
2012	805,231,650.00	515,882,185.00	<b>64.066%</b>
2013	662,000,000.00	643,163,789.00	<b>97.154%</b>
2014	662,000,000.00	754,954,619.00	<b>114.041%</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Toraja utara

Berbeda halnya dengan pajak hotel, pajak restoran jika di lihat dari tahun 2009-2014 yang di sajikan dalam tabel (lihat table II) justru mengalami peningkatan tiap tahunnya.

**Tabel 2. Realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Toraja Utara**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2009	135,000,000.00	156,635,798.00	<b>116,026%</b>
2010	175,000,000.00	210,065,062.00	<b>120,037%</b>
2011	230,000,000.00	260,921,475.00	<b>113,444%</b>
2012	260,000,000.00	330,797,868.00	<b>127,229%</b>
2013	323,000,000.00	363,821,691.00	<b>112.638%</b>
2014	323,000,000.00	424,595,204.00	<b>131.453%</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Toraja utara

Di lihat dari banyaknya hotel dan restoran/rumah makan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 yang berjumlah 20 unit, tahun 2013 mengalami

penambahan menjadi 27 unit, dan pada tahun 2014 mencapai 29 unit (lihat table III), bisa dikatakan cukup banyak untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah.

**Tabel 3. Banyaknya hotel dan restoran/rumah makan di kabupaten Toraja Utara, tahun 2010-2014**

No	Tahun <i>Year</i>	Hotel/ <i>Hotels</i>		Restoran/Rumah Makan <i>Restaurant</i>
		Berbintang <i>Classified</i>	Non Bintang <i>Non Star</i>	
1	2010	13	32	20
2	2011	13	32	20
3	2012	13	32	20
4	2013	11	32	27
5	2014	11	29	29

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja utara

Jika di lihat dari jumlah akomodasi, kamar dan tempat tidur yang tersedia tahun 2010-2014 serta banyaknya wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2010 –2014 yang mengalami peningkatan tiap tahun, bisa di katakan cukup berpengaruh dalam meningkatkan pendapat setiap hotel dan restoran di kabupaten Toraja Utara.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Faktor-faktor apakah yang berperan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara “

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berperan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara”

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang ilmu administrasi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan pajak hotel dan restoran.
2. Manfaat Praktis, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran sebagai sumber PAD.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Konsep Optimalisasi Penerimaan Pajak**

Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (dalam Utomo, 2013: 12) mengemukakan bahwa : “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.<sup>5</sup> Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Sari (2013: 75) yaitu:

##### **1. Teori Asuransi**

Pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan seperti terdapat dalam asuransi pertanggungan. Jadi perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

---

<sup>5</sup> W.J.S Poerwadarminta dalam Ari Utomo. 2013. Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2011). Universitas Lampung Bandar Lampung, hal 12

## 2. Teori Kepentingan

Beban pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

## 3. Teori Daya Pikul

Pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh Negara terhadap warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta. Jadi pembebanan pajak harus sama besarnya setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing.

## 4. Teori Bakti

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada Negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.

## 5. Teori Daya Beli.

Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan Negara. Warga negara harus membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar, berarti pendapatannya besar pula. Daya beli tersebut oleh Negara disebut pajak, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan.<sup>6</sup>

Menurut Mardiasmo (2011: 8) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bisa berasal dari kesadaran wajib pajak. Adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dari wajib pajak terhadap pembayaran pajak dikelompokkan menjadi :

---

<sup>6</sup> Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Cetakan Ke-1. Bandung: PT Refika Aditama, hal 75.

1. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang di sebabkan antara lain: perkembangan intelektual moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit di pahami masyarakat, sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: *Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan *Tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak).<sup>7</sup>

Menurut Kaho (2010: 180) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain.

1. Pengetahuan tentang Asas-asas Organisasi  
Keberhasilan suatu aktivitas, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan anggota-anggotanya dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi.
2. Disiplin Kerja Pegawai  
Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan, prosedur, dan aturan main yang telah ditentukan dalam setiap organisasi dapat ditegakkan.
3. Pengawasan yang Efektif  
Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai intruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak. Hal yang sangat penting dalam pengawasan adalah menentukan: *standard* (alat pengukur); mengadakan penilaian (*evaluate*); dan mengadakan tindakan perbaikan ( *corrective action*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. XVII. Jakarta: C.V Andi Offset, hal 8.

<sup>8</sup> Josef Riwu Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Cetakan Ke-10. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, hal 180.

Untuk dapat menilai baik atau tidaknya pajak daerah yang ada, maka dapat menggunakan lima tolak ukur sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjip (dalam Rosdiana dan Irianto, 2013: 65) yakni:

1. Hasil (*Yield*), memadai tidaknya suatu pajak daerah dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*Equity*), dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horizontal dan vertical. Pajak harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil “beban lebih” pajak.

4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemampuan tata usaha.
5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*), haruslah jelas kepada daerah mana pajak harus dibayarkan dan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain. Dari segi potensi ekonominya, pemungutan pajak daerah juga hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah. Selain itu, pajak daerah hendaknya juga tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha daerah.<sup>9</sup>

Menurut Devano dan Rahayu (2006: 26) ada beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak ke kas Negara / daerah yaitu:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerima pajak, yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak

---

<sup>9</sup> Tjip dalam Haula Rosdiana dan Edi slamet Irianto. 2013. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, hal 65.

## 2. Tingkat Intektualitas Masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik secara umum, maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka, akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakan.

## 3. Kualitas Petugas Pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi )

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan. Petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

#### 4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting.<sup>10</sup>

### 2. Konsep Pajak Daerah

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan, dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Menurut Undang-Undang No. 06 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang No. 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut undang-undang KUP) pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, hal 26.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *op. cit.* Pasal 1

Terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Adriani (dalam Sari, 2013: 34) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.<sup>12</sup>

2. Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011: 1) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.<sup>13</sup>

3. Soemohamidjojo (dalam Kaho, 2010: 144) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma huku, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undangundang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
3. kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Pajak dipungut oleh negara yaitu pemerintah pusat maupun daerah

<sup>12</sup> Andriani dalam Diana Sari. *op. cit.* hal. 34

<sup>13</sup> Soemitro dalam Mardiasmo. *Op. cit.* hal 1

<sup>14</sup> Soemohamidjojo dalam Josef Riwu Kaho. *Op. cit.* hal 144



5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*

Waluyo (2006: 6) menjelaskan dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*Budgeteir*) dan fungsi mengatur (*Reguler*).

1. Fungsi penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.<sup>15</sup>

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Mardiasmo (2011: 5) mengelompokkan pajak menjadi tiga kelompok besar yang didasarkan pada kesamaan sifat dan ciri yang dimiliki, yaitu :

1. Pajak menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

---

<sup>15</sup> Waluyo.2006. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat, hal 6.

## 2. Pajak menurut sifat-sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah.

## 3. Pajak menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah pasal 1 angka 10 yaitu :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>17</sup>

Pajak daerah pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan dengan asas pajak negara yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan

---

<sup>16</sup> Mardiasmo. *Op. cit.* hal 5

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2009. *Op. cit.* pasal 1

perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan umum pengeluaran pemerintah yang balas jasanya tidak langsung diberikan, sedangkan pungutannya dilaksanakan secara paksa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah (Bab VIII pasal 157) , dan mengalami perubahan yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/ bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dalam UU No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1) Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor ;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan; dan
- e) Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.<sup>18</sup>

### **3. Pengertian Pajak Hotel dan Restoran**

#### **a. Pajak Hotel**

Pajak Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut: Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>19</sup>

Siahaan (2010: 300) menjelaskan bahwa dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui yaitu :

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus di sediakaan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Pasal 2

<sup>19</sup> *Ibid.* Pasal 1.

- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran terhadap pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat melakukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah Pasal 32 yaitu:

- 1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- 2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- 3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

---

<sup>20</sup> Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Cetakan Ke-2. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, hal 300.

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.<sup>21</sup>

#### Pasal 33

- 1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- 2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.<sup>22</sup>

#### Pasal 34<sup>23</sup>

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

#### Pasal 35

- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>24</sup>

#### Pasal 36

- 1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- 2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.<sup>25</sup>

### b. Pajak Restoran

Pajak Restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai berikut: Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Op. cit.* Pasal 32

<sup>22</sup> *Ibid.* Pasal 33

<sup>23</sup> *Ibid.* Pasal 34

<sup>24</sup> *Ibid.* Pasal 35

<sup>25</sup> *Ibid.* Pasal 36

<sup>26</sup> *Ibid.* Pasal 1.

Siahaan (2010: 328) menjelaskan bahwa dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui yaitu :

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembaayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.<sup>27</sup>

Undang-undang No 28 tahun 2009 menjelaskan tentang Pajak Restoran yaitu :

Pasal 37

- 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- 2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- 3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Cetakan Ke-2. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, hal 328

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. *Op. cit.* Pasal 37

#### Pasal 38

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- 2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.<sup>29</sup>

#### Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.<sup>30</sup>

#### Pasal 40

- 1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>31</sup>

#### Pasal 41

- 1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- 2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.<sup>32</sup>

Jadi Objek Pajak yang dipungut dalam Pajak Hotel dan Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran baik di Hotel dan Restoran. Yang meliputi fasilitas penginapan misalnya cottage, motel, wisma, losmen, dan rumah penginapan. Juga pelayanan penunjang antara lain biaya telepon, faksmail, telex, fotocopy, pelayanan cuci dan setrika dan pengangkutan lainnya, juga fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan atau yang dikelola oleh hotel. Juga jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel, dan perjamuan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. Adapun yang termasuk dengan subjek pajak (SP) adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran-pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Pasal 38

<sup>30</sup> *Ibid.* Pasal 39

<sup>31</sup> *Ibid.* Pasal 40

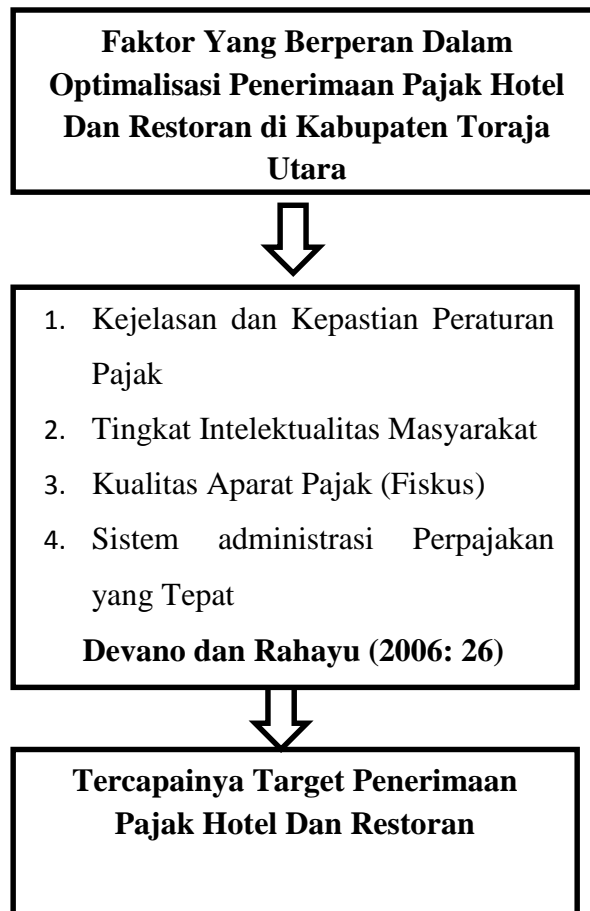
<sup>32</sup> *Ibid.* Pasal 41



Jadi wajib pajak hotel dan restoran (WP) adalah pengusaha hotel dan atau restoran. Pajak Hotel dan Restoran dipungut oleh daerah tempat hotel dan atau rumah makan atau restoran berlokasi. Adapun dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran dipungut 10% dari pembayaran yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan atas jasa hotel.

## **B. Kerangka Konseptual**

Dalam rangka optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah aspek yang sangat penting untuk diteliti sebagai suatu pendekatan dalam memahami optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah terdiri dari Potensi Pajak Daerah, yang merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kekuatan/kemampuan dari pajak daerah di Kabupaten Toraja Utara. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui analisis yang mendalam terhadap Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak, Tingkat Intelegitualitas Masyarakat, Kualitas Aparat Pajak (Fiskus), dan sistem administrasi Perpajakan yang Tepat terhadap pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Dari uraian Konsep diatas disimpulkan suatu Kerangka Pemikiran Penelitian yaitu :



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan karena bersifat dinamis.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang masalah yang diteliti di lapangan.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek kajian dan mengadakan interaksi langsung dengan para pengelola pajak daerah yang bertujuan mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan reestoran di Kabupaten Toraja Utara.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yakni di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Adapun pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini karena Kabupaten Toraja Utara adalah salah satu kabupaten yang terkenal dari segi kebudayaan dan pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara yang memberikan sumbangsih besar dalam peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Toraja Utara.

### **C. Tahap-tahap Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat dua tahap penelitian:

1. Tahap persiapan penelitian, dimana peneliti menyusun rancangan penelitian dengan mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pada tahap ini peneliti juga mempersiapkan dan pedoman wawancara terstruktur. Pedoman wawancara terstruktur yang telah disusun berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan indikator yang digunakan peneliti.
2. Tahap pelaksanaan penelitian, pada tahap ini penelitian dimulai dengan pengajuan surat izin penelitian di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Kota Makassar yang direkomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar selanjutnya surat izin penelitian tersebut dibawa ke Kantor Bupati Kabupaten Toraja Utara untuk meminta surat izin meneliti di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya peneliti akan terjun ke lapangan untuk melakukan

wawancara kepada informan yang telah ditetapkan. Setelah melakukan wawancara langkah selanjutnya dengan mengecek apakah informasi yang diberikan betul-betul sesuai dengan yang ada di lapangan. Terakhir memantapkan data-data dan mengkaji hasil penelitian.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni:

1. Data sekunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.
2. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni sumber data, dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan. Adapun informan yang di maksud adalah :

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah | : 1 Orang |
| 2) Kepala Seksi Penagihan Pajak   | : 1 Orang |
| 3) Petugas Pemungut Pajak         | : 2 Orang |
| 4) Pemilik Hotel dan Restoran     | : 3 Orang |
| Jumlah                            | : 7 Orang |

#### **E. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian**

##### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di

Kabupaten Toraja Utara dengan memperhatikan indikator kejelasan dan kepastian peraturan pajak, tingkat intelektualitas masyarakat, kualitas aparat pajak (fiskus) dan sistem administrasi perpajakan yang tepat

## **2. Deskripsi Fokus Penelitian**

- a. Kejelasan dan kepastian peraturan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya kejelasan undang-undang yang mengatur pajak baik itu penetapan objek pajak, penetapan subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak, sehingga mudah di mengerti oleh fiskus maupun wajib pajak.
- b. Tingkat intelektualitas masyarakat yang di maksud dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat akan peraturan pajak sehingga tercipta wajib pajak yang sadar akan kewajibannya.
- c. Kualitas aparat pajak (fiskus) dalam hal ini haruslah orang yang berkompeten pada bidang perpajakan, disiplin, bertanggung jawab, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi.
- d. Sistem administrasi perpajakan yang tepat dalam penelitian ini menyangkut bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Secara terminologis instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau mengumpulkan informasi kuantitatif maupun kualitatif sebagai bahan pengolahan yang berkenaan dengan objek ukur yang sedang diteliti. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan

aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis ada dua (1) atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan dan (2) atribut non-kognitif, perangsangnya adalah pernyataan.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi sejauh mana peneliti kualitatif siap melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan, dimana yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri sejauh mana pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

#### **G. Prosedur Pengumpulan Data**

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola/petugas dan wajib pajak untuk mengetahui penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai faktor-faktor yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara, dengan dibantu alat perekam (*recorder*) alat ini digunakan sebagai bahan *crosscheck*, jika pada saat analisa terdapat keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara, serta peneliti juga mencatat semua kejadian dan data atau informasi dari informan yang selanjutnya kesemuanya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini perlu dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian. Selain itu, juga sebagai salah satu bukti bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan. Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini berupa dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti, foto atau video yang diambil dalam pelaksanaan penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

## H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian dan keabsahan data bertujuan untuk menguji kredibilitas data atau untuk mendapatkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Pengujian dan keabsahan data ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

### 1. Triangulasi

Sugiyono (2014: 273) menjelaskan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.<sup>33</sup>

Syekh (2011: 12) menjelaskan triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan cara : membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

---

<sup>33</sup> *Ibit.* hal 273



dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>34</sup>

Di dalam penelitian, penulis menggunakan triangulasi sumber dimana pengujian dan keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan menggunakan teknik yang sama. Data yang telah diperoleh dari informan kemudian dianalisis dan dilihat kesesuaian informasi yang diberikan. Informasi yang dianggap sama dan relevan dari beberapa informan akan dipilih untuk menjadi bahan pertimbangan dan kemudian ditarik kesimpulannya.

## 2. *Membercheck*

Menurut Sugiyono (2014: 276) *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian data yang diperoleh dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan sesuai dan disepakati oleh pemberi data maka data tersebut dapat dikatakan valid sehingga semakin kredibel/dipercaya.<sup>35</sup> Di dalam penelitian ini, *membercheck* akan dilakukan setelah pengambilan data selesai atau setelah penarikan kesimpulan.

## I. Analisis Data

Sugiyono menjelaskan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data

---

<sup>34</sup> Sayid Syekh. 2011. Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial. Cetakan Ke-1. Jakarta: Gaung Persada Pers, hal 12

<sup>35</sup> Sugiyono. *op. cit.* hal 276

dalam periode tertentu<sup>36</sup>. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>37</sup> Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Sugiyono (2014: 249) menjelaskan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>38</sup> Oleh karena itu reduksi data dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan pada hal-hal penting dari kejelasan dan kepastian peraturan pajak, tingkat intelektualitas masyarakat, kualitas aparat pajak ( fiskus ), dan sistem administrasi Perpajakan yang Tepat untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara . Data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

b. *Data display* (Penyajian Data)

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 249) mengemukakan bahwa dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hal 246

<sup>37</sup> Miles dan Huberman.*loc. cit*

<sup>38</sup> *Ibid.* hal 249

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>39</sup>

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk teks yang naratif karena memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian selanjutnya. Pada langkah ini, penulis menyusun data yang relevan tentang faktor-faktor yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara. Data yang telah disusun kemudian menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu

c. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Dari sajian data yang tersusun selanjutnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan awal yang didapat masih bersifat sementara dan sewaktu-waktu akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang didapat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah Kabupaten Toraja Utara dan gambaran umum objek penelitian yaitu Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

#### **1. Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara**

##### **a. Kondisi Geografis**

Kabupaten Toraja Utara dengan luas wilayah 1.151,47 km<sup>2</sup> atau sebesar 2,5 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km<sup>2</sup>) dengan kondisi wilayah secara umum merupakan daerah ketinggian dan daerah kabupaten/ kota yang kondisi topografinya paling tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini tidak memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah daerah ketinggian. Sementara dalam hal iklim, termasuk beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 14° -26° celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 82 % - 86 %.

Secara geografis, Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2° – 3° Lintang Selatan dan 119° – 120° Bujur Timur dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) kecamatan dan terdiri dari 111 desa dan 40 kelurahan dengan pembagian sebagai berikut:

a) Kecamatan Sopai

- Kelurahan Tombang Langda
- Kelurahan Langda
- Kelurahan Nonongan Selatan
- Kelurahan Marante
- Kelurahan Salu Sopai
- Kelurahan Salusarre
- Kelurahan Salu
- Kelurahan Nonongan Utara

b) Kecamatan Kesu

- Kelurahan Sangbua
- Kelurahan Tadongkon
- Kelurahan Angin-angin
- Kelurahan Tallu Lolo
- Kelurahan Rinding Batu
- Kelurahan Ba'tan
- Kelurahan Pantanakan Lolo

c) Kecamatan Sanggalangi

- Kelurahan Tallung Penanian
- Kelurahan Pata'Padang
- Kelurahan Pa'paelean

- Kelurahan Buntu La'bo
- Kelurahan Tandung La'bo
- Kelurahan La'bo

d) Kecamatan Buntao

- Kelurahan Sapan Kua Kua
- Kelurahan Misa Ba'bana
- Kelurahan Rinding Kila' Balabatu
- Kelurahan Tongkonan Basse
- Kelurahan Issong Kalua
- Kelurahan Tallang Sura'

e) Kecamatan Rantebua

- Kelurahan Rantebua Sanggalangi
- Kelurahan Rantebua Sumalu
- Kelurahan Rantebua
- Kelurahan Buangin
- Kelurahan Bokin
- Kelurahan Makkuan Pare
- Kelurahan Pitung Penanian

f) Kecamatan Nanggala

- Kelurahan Karre Penanian
- Kelurahan Karre Limbong
- Kelurahan Nanna Nanggala
- Kelurahan Basokan

- Kelurahan Nanggala
- Kelurahan Sangpiak Salu
- Kelurahan Tandung Nanggala
- Kelurahan Lili' Kira

g) Kecamatan Tondon

- Kelurahan Tondon
- Kelurahan Tondon Matallo
- Kelurahan Tondon Langi'
- Kelurahan Tondon Siba'ta

h) Kecamatan Tallunglipu

- Kelurahan Tampo Tallunglipu
- Kelurahan Tagari Tallunglipu
- Kelurahan Rante Paku Tallunglipu
- Kelurahan Tallunglipu Matallo
- Kelurahan Tallunglipu
- Kelurahan Tantanan Tallunglipu
- Kelurahan Buntu Tallunglipu

i) Kecamatan Rantepao

- Kelurahan Saloso
- Kelurahan Limbong
- Kelurahan Mentirotiku
- Kelurahan Laang Tanduk
- Kelurahan Singki'

- Kelurahan Karassik
- Kelurahan Rantepao
- Kelurahan Rantepasele
- Kelurahan Pasele
- Kelurahan Malango
- Kelurahan Penanian

j) Kecamatan Tikala

- Kelurahan Buntu Barana
- Kelurahan Tikala
- Kelurahan Sareale
- Kelurahan Buntu Batu
- Kelurahan Embatau
- Kelurahan Benteng Ka'do To' Riu
- Kelurahan Pangden

k) Kecamatan Sesean

- Kelurahan Buntu Lobo'
- Kelurahan Parinding
- Kelurahan Deri
- Kelurahan Bori' Rante Letok
- Kelurahan Bori
- Kelurahan Bori Lombongan
- Kelurahan Pangli
- Kelurahan Pangli Selatan



- Kelurahan Pallawa'

l) Kecamatan Balusu

- Kelurahan Palangi
- Kelurahan Karua
- Kelurahan Lilikira Ao'gading
- Kelurahan Awak Kawasik
- Kelurahan Tagari
- Kelurahan Balusu
- Kelurahan Balusu Bangun Lipu

m) Kecamatan Sa'dan

- Kelurahan Sa'dan Andulan
- Kelurahan Sa'dan Tiroallo
- Kelurahan Sa'dan Matallo
- Kelurahan Sangkaropi
- Kelurahan Sa'dan Malimbong
- Kelurahan Sa'dan Pebulian
- Kelurahan Sa'dan Ballo Pasange
- Kelurahan Sa'dan Liku Lambe'
- Kelurahan Sa'dan Pesondongan
- Kelurahan Sa'dan Ulusalu

n) Kecamatan Bangkele Kila

- Kelurahan Toyasa Akung
- Kelurahan Batu Limbong

- Kelurahan Bengkele Kila
- Kelurahan Tampan Bonga

o) Kecamatan Sesean Suloara

- Kelurahan Tonga Riu
- Kelurahan Landorundun
- Kelurahan Suloara
- Kelurahan Sesean Matallo
- Kelurahan Lempo

p) Kecamatan Kapala Pitu

- Kelurahan Benteng Mamullu
- Kelurahan Kapala Pitu
- Kelurahan Kantun Poya
- Kelurahan Benteng Ka'do
- Kelurahan Sikuku'
- Kelurahan Polo Padang

q) Kecamatan Dende Piongan Napo

- Kelurahan Kapolang
- Kelurahan Piongan
- Kelurahan Dende
- Kelurahan Pasang
- Kelurahan Paku
- Kelurahan Ma'dong
- Kelurahan Buntu Tagari

- Kelurahan Marinding

r) Kecamatan Awan Rante Karua

- Kelurahan Batu Lotong
- Kelurahan Awan
- Kelurahan Londong Biang
- Kelurahan Buntu Karua

s) Kecamatan Rinding Allo

- Kelurahan Buntu Batu
- Kelurahan Pangala
- Kelurahan Ampang Batu
- Kelurahan Pangala Utara
- Kelurahan Mai'ting
- Kelurahan Lo'ko Uru Tanete Batu
- Kelurahan Rinding Allo
- Kelurahan Bulu Langkan
- Kelurahan Lempo Poton

t) Kecamatan Buntu Pepasan

- Kelurahan Parandangan
- Kelurahan Buntu Minanga
- Kelurahan Sarambu
- Kelurahan Sapan
- Kelurahan Rante Uma
- Kelurahan Pulu' - Pulu'

- Kelurahan Pengkaoran Manuk
- Kelurahan Batu Busa
- Kelurahan Roroan Barra' Barra'
- Kelurahan Pangkung Batu
- Kelurahan Ponglu
- Kelurahan Paonganan
- Kelurahan Talimbangan

u) Kecamatan Baruppu

- Kecamatan Baruppu Selatan
- Kecamatan Baruppu Batu
- Kecamatan Baruppu Utara
- Kecamatan Baruppu Selatan<sup>40</sup>

**b. Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara**

Visi Kabupaten Toraja Utara adalah “Toraja Utara, daerah wisata budaya kaya pesona dengan ragam kreativitas dan kasih yang menyejahterakan”. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara tersebut dirumuskan Misi sebagai berikut: “Menciptakan berbagai kemudahan yang memungkinkan warganya memiliki tingkat kreativitas yang dapat menampilkan hasil-hasil yang gemilang”.

---

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara.2016.”Kabupaten Toraja Utara dalam Angka 2016”.BPS Kab. Toraja Utara. Hal 1

Pokok-Pokok yang menjadi muatan misi tersebut adalah:

- a. Memampu-dayakan (*empowering*) para pelaku pembangunan dalam berbagai bidang melalui pendirian Pusat Pelatihan dan Ketrampilan dan memperkuat lembaga-lembaga pendidikan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki etos kerja dan berdaya saing tinggi.
- b. Memperkuat infrastruktur pemerintahan, menggalakkan implementasi *e-administration* serta memasyarakatkan prinsip-prinsip utama dari *Good Governance*.
- c. Membenahi objek-objek wisata multi dimensi, membangun pusat pengembangan budaya, dan merevitalisasi nilai-nilai adat dan budaya.
- d. Meningkatkan produktivitas wilayah melalui pembangunan sentra-sentra produksi dan pengolahan hasil-hasil peternakan, pertanian, perkebunan rakyat, dan perikanan.
- e. Membangun dan membenahi berbagai macam dan rute jaringan transportasi untuk kemudahan akses internal dan akses dari dan ke Toraja Utara.
- f. Menciptakan jaringan komunikasi menyeluruh dalam rangka pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- g. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat yang didukung oleh pembangunan lingkungan hidup yang asri,

sehat, nyaman dan aman; Melindungi masyarakat dari berbagai jenis penyakit dan kejahatan hingga pada tingkat terendah.

- h. Menyusun berbagai aturan perundang-undangan daerah dalam berbagai sektor pembangunan dan pemerintahan.

## **2. Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

### **a. Lokasi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi.

DPPKAD Kabupaten Toraja Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Peraturan Bupati Toraja Utara No 22 Tahun 2010 tentang kewenangan, uraian Tugas Jabatan, dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> DPPKAD.2016.Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD). Kabupaten Toraja Utara, hal 11

## **b. Visi dan Misi**

Adapun Visi DPPKAD yaitu : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang professional, berkualitas, bersih transparan dan akuntabilitas”. Adapun pengertian Visi tersebut adalah mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional melalui peranan masing-masing pegawai yang memiliki keuanggulan yang kompeten dalam pelaksanaan tugas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta para pegawai yang memiliki pribadi yang disiplin, tangguh dan handal. Disamping itu juga memiliki ketrampilan yang aktual serta berwawasan luas sebagai landasan untuk bertindak dengan penuh pertimbangan dan mempunyai sikap positif.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Aset Daerah dimasa depan dirumuskan Misi sebagai Berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah
- 2) Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut diatas, maka dikembangkan nilai-nilai Organisasi yang akan selalu mempengaruhi perilaku dan sikap serta tindakan yang diyakini kebenarannya sebagai berikut:

- 1) Profesional, dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan didukung persyaratan kerja kompetensi, integritas dan responsibilitas.
- 2) Kehati-hatian, dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan kehati-hatian.

- 3) Transparansi, dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dalam bentuk keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Disiplin, dimaksudkan sikap yang selalu taat pada aturan yang berlaku.
- 5) Kebersamaan/kerjasama, dimaksudkan bahwa semua aparat berkomitmen saling menghindari ego sektoral yang mementingkan kepentingan sendiri atau bagian organisasinya sendiri.
- 6) Kesederhanaan, dimaksudkan dalam melaksanakan pelayanan tidak berbelit-belit untuk meningkatkan mutu pelayanan pada instansi pengguna maupun masyarakat.
- 7) Keamanan, dimaksudkan bahwa dalam setiap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah penuh kehati-hatian dan tidak merugikan Keuangan Negara dan Daerah.<sup>42</sup>

### **c. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Sementara itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hal.62



- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Pemberian izin dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
- 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis Dinas di Bidang Pendapatan Daerah.
- 4) Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.<sup>43</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

Hasil wawancara yang diperoleh terkait faktor-faktor yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan kejelasan dan kepastian peraturan pajak, tingkat intelektualitas masyarakat, kualitas aparat pajak (fiskus) dan sistem administrasi perpajakan yang tepat. Data yang diuraikan berdasarkan hasil triangulasi informan yang diwawancarai di lokasi dan tempat yang berbeda yang selanjutnya direduksi berdasarkan data yang diperoleh. Berikut hasil penelitian yang diperoleh:

### **1. Faktor Yang Berperan Dalam Optimaliasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran**

#### **a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak**

Pada penelitian ini kejelasan dan kepastian peraturan Pajak yakni kejelasan Undang-Undang yang mengatur pajak baik itu penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak. Selain itu peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, dan lokasi kantor penerima pajak yang mudah dicapai.

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal.11

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu staf bidang penagihan Aswin Basri, (wawancara tanggal 05 September 2016), yaitu:

“Penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak tentunya ditetapkan sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku.”<sup>44</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Neti Latanna, (wawancara tanggal 08 September 2016), yaitu:

“Untuk objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak itu sudah diatur dan di tetapkan dalam Undang-undang. Seperti tarif pajak hotel sebesar 10%”.<sup>45</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Hendra S. yang juga adalah staf Bidang Penagihan, (wawancara tanggal 05 September 2016), yaitu:

“Yang saya tahu semuanya sudah diatur dan ditetapkan sesuai dengan Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.”<sup>46</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara tidak jauh berbeda dengan peraturan pajak di daerah lain dimana sudah jelas diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu prosedur juga tidak terlalu rumit, sehingga tidak membuat bingung para wajib pajak. Selain itu lokasi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Aswin Basri, tanggal 05 September 2016 di Kantor DPPKAD

<sup>45</sup> Wawancara dengan Neti Latanna, tanggal 08 september 2016 di Rantepao

<sup>46</sup> Wawancara dengan Hendra S, tanggal 05 September 2016 di Kantor DPPKAD

dan Aset Daerah yang berada di pusat kota Rantepao dan bersebelahan dengan kantor Bupati Toraja Utara, sehingga tidak sulit untuk dijangkau oleh wajib pajak.

#### **b. Tingkat Intelegktualitas Masyarakat**

Pada penelitian ini yang akan dilihat dari tingkat intelegktualitas masyarakat adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat (wajib pajak) tentang peraturan yang mengatur pajak hotel dan restoran.

Sehubungan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak akan peraturan pajak, tampaknya sebagian besar wajib pajak tidak mengetahui dan tidak mengerti akan Peraturan/Undang-Undang yang mengatur pajak hotel dan restoran baik itu UU No 28 Tahun 2009 maupun Perda Kabupaten Toraja Utara No 2 Tahun 2011. Hal ini di ketahui dari Yansi Alfian, (wawancara tanggal 05 September 2016), Salah satu pengelola Cafe, sebagai berikut:

“saya tidak tahu mengenai peraturan apa yang mengatur pajak restoran, yang saya tahu setiap bulan saya harus rutin membayar pajak karena itu adalah kewajiban kami selaku pengelola Cafe”.<sup>47</sup>

Hal senada diungkapkan oleh ibu Neti Latanna, (wawancara tanggal 08 September 2016), salah satu pemilik Wisma, sebagai berikut:

“saya tidak tahu dan tidak mengerti tentang Undang-Undang yang mengatur pajak hotel karena saya kuliah bukan jurusan hukum jadi saya tidak mengerti. Tugas kami sebagai pemilik hanya membayar pajak 10% dari penghasilan seperti yang telah di tetapkan”.<sup>48</sup>

Sehubungan dengan rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak akan peraturan pajak, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Yansi Alfian, wawancara tanggal 05 September 2016

<sup>48</sup> Wawancara dengan Neti Latanna, *loc.cit*

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Toraja Utara terkait kurangnya pengetahuan wajib pajak akan peraturan pajak adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan pajak, tata cara pemungutan pajak, sanksi-sanksi administrasi dll. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Neti Latanna, (wawancara tanggal 08 September 2016), yaitu sebagai berikut :

“yang saya ingat sosialisasi dari petugas pajak pernah ada. Namun sangat jarang”.<sup>49</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Seksi Penagihan Bapak Yunus Sumule, SE (wawancara tanggal 05 September 2016), sebagai berikut:

“Kalau masalah sosialisasi langsung ke masyarakat, kami dari petugas pajak biasa adakan, namun tidak rutin”.<sup>50</sup>

Berbeda dengan Ibu Neti Latanna dan Bapak , SE Sumule yang membenarkan adanya sosialisasi dari petugas pajak meskipun sangat jarang, Ibu Ludia Kirung justru tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar adanya sosialisasi dari petugas pajak, seperti yang diungkapkan dalam wawancara tanggal 08 September 2016 sebagai berikut:

“Yang saya tahu Tidak pernah ada sosialisasi mengenai Undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur pajak.”<sup>51</sup>

Dari ketiga hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Toraja Utara sendiri pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dari petugas pajak terhadap masyarakat (wajib pajak) mengenai peraturan pajak, tata

---

<sup>49</sup> *ibid*

<sup>50</sup> Wawancara dengan Yansi Alfian. *loc.cit*

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ludia Kirung. wawancara tanggal 08 september 2016 di warung makan D'lia Rantepao

cara pemungutan pajak, sanksi-sanksi administrasi dll, masih sangat jarang dan hampir tidak pernah terdengar oleh masyarakat. Oleh sebab itu masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang belum mengerti bahkan belum paham tentang peraturan-peraturan pajak itu sendiri.

**c. Kualitas Aparat Pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)**

Salah satu faktor yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran adalah bagaimana kualitas aparat atau fiskus pajak. Petugas pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat pembayar pajak apakah sudah memiliki intelektualitas tinggi, terlatih dengan baik, bermoral baik, memiliki kecakapan teknis, dan disiplin dalam melakukan tugasnya. Petugas pajak harus berkompeten pada bidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

Jabatan struktural yang terdapat di DPPKAD Kabupaten Toraja Utara terdiri dari: 1 orang eselon II/b, 1 orang eselon III/a, 7 orang eselon III/b, dan 24 orang eselon IV/a. Untuk melaksanakan aktivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, didukung oleh Pegawai Negeri Sipil dan tenaga PHT dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. Jumlah Pegawai DPPKAD Kabupaten Toraja Utara Menurut Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	6
2	Golongan II	11
3	Golongan III	38
4	Golongan IV	7
5	Tenaga PHT	74

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Toraja Utara

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di DPPKAD Kab. Toraja Utara sebanyak 62 orang dan jumlah Tenaga PHT sebanyak 74 Orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 44 orang dan perempuan sebanyak 30 orang.

**Tabel 5. Jumlah Pegawai DPPKAD Kabupaten Toraja Utara Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	5
2	SMP	3
3	SMA/SMK	14
4	D-3	2
5	S1	32
6	S2	6

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Toraja Utara

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar pegawai yang ada di DPPKAD Kab. Toraja Utara adalah lulusan perguruan tinggi, meskipun masih ada beberapa orang yang hanya lulusan SD dan SMP.

**Tabel 6. Jumlah Pegawai DPPKAD Kabupaten Toraja Utara Menurut Diklat Perjenjangan**

No	Diklat Perjenjangan	Jumlah
1	ADUMLA/PIM IV	20
2	SPAMA/PIM III	6
3	SPAMEN/PIM II	-

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Toraja Utara

Petugas pajak yang bertugas dalam pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan objek pajak selain memiliki intelektualitas yang tinggi, tentunya juga harus berkompeten dan terampil pada bidangnya. Oleh sebab itu petugas pajak yang ditugaskan dibidang ini terlebih dahulu harus diberikan *training* dan pelatihan-pelatihan khusus terkait masalah pendaftaran dan pendataan pajak, penetapan pajak dan penagihan pajak, sehingga ketika bertugas petugas pajak sudah mampu melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini diketahui dari pernyataan Drs. Firdaus Rin Bata, M.Si (Wawancara tanggal, 05 September 2016) mengemukakan bahwa:

“Fiskus pajak yang bertugas menangani masalah pajak adalah orang-orang yang sudah berkompeten dibidangnya dan tentunya sudah melewati proses *training* dan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Selain itu mereka bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya serta disiplin khususnya dalam pelaporan”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Drs. Firdaus Rin Bata, M.Si. Tanggal 05 September 2016 di Kantor DPPKAD Toraja Utara

Hal senada diungkapkan oleh Yunus Sumule, SE (Wawancara tanggal 05 September 2016) yang mengemukakan bahwa

“ Fiskus pajak yang bertugas khususnya di bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan bidang penagihan adalah orang-orang yang sudah berkompeten pada bidang itu. Mereka ditempatkan dibidang itu karena mereka mampu melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu ada pelatihan-pelatihan khusus kepada mereka sebelum menjalankan tugas dibidang itu. Ketika seorang fiskus pajak melakukan kesalahan dalam bertugas, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. ”<sup>53</sup>

Selain memiliki ketrampilan yang baik, petugas pajak juga harus memiliki moral yang tinggi. Oleh sebab itu petugas pajak harusnya bersikap ramah dan sopan khususnya kepada wajib pajak. Bermoral tidaknya fiskus pajak hanya bisa dinilai oleh wajib pajak sendiri. Kebanyakan fiskus pajak tidak menempatkan dirinya sebagai pelayan public yang bertugas untuk melayani masyarakat sehingga mereka tidak ramah dan sopan bahkan tidak memperlakukan wajib pajak dengan baik. Namun hal ini berbeda dengan petugas pajak di DISPENDA Toraja Utara khususnya yang bertugas menangani pajak Hotel dan Restoran. Ibu Ludia Kirung salah seorang pengelola warung D’Lia (wawancara tanggal 08 September 2016) mengemukakan bahwa “ Petugas yang bertugas dalam penagihan pajak sangat ramah dan sopan kepada kami wajib pajak”. Hal serupa diungkapkan oleh ibu Neti Latanna (wawancara 08 September 2016) bahwa “ Petugas pajak yang bertugas melakukan penagihan sudah melakukan tugasnya dengan baik, mereka juga bersikap ramah dan sopan. ”<sup>54</sup>

Selain melakukan wawancara dengan wajib pajak, peneliti juga berkesempatan untuk ikut melakukan penagihan pajak bersama dengan fiskus

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Yunus Sumule SE. wawancara tanggal 05 september 2016 di Kantor DPPKAD Toraja Utara.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ludia Kirung, *loc.cit*



pajak ke beberapa hotel dan café yang ada di Toraja Utara. Petugas yang bertugas dalam penagihan pajak berpenampilan rapi dan juga sangat bersikap ramah dan sopan kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak merasa segan dan canggung untuk berbicara dan bercerita bahkan tak jarang yang menyampaikan keluhan-keluhan langsung kepada petugas pajak.

#### **d. Sistem Administrasi Perpajakan Yang Tepat**

Administrasi perpajakan diperlukan dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem dan lembaga. Sistem administrasi perpajakan di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peranan yang sangat penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (kantor pelayanan pajak) sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat sehingga tercipta wajib pajak yang taat pajak.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara Sendiri Prosedur penagihan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan dengan jelas dan tidak rumit serta berbelit-belit. Prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara secara umum dimulai dari wajib pajak mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dengan jelas dan lengkap. Formulir yang sudah isi kemudian ditandatangani oleh wajib pajak sendiri atau orang yang diberi kuasa. Formulir yang telah diisi kemudian dikembalikan, setelah itu seksi pendataan yang akan menghimpun dan mencatat objek dan subjek pajak tersebut. Wajib pajak yang sudah terdaftar wajib melaporkan pajak bulanan dan pajak

tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diambil di Kantor Pelayanan Pajak, atau dapat di *fotocopy*. SPT diisi sendiri oleh wajib pajak dengan benar dan lengkap kemudian ditandatangani sendiri oleh wajib pajak. SPT yang telah ditandatangani kemudian dikembalikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Selanjutnya wajib pajak membayar dan menyetor sendiri pajaknya di Kantor Pos dan Giro atau melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Terakhir penagihan pajak hotel dan restoran oleh seksi penagihan yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.

Diberlakukannya *Self Assesment System* di Indonesia, justru memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam pelaporan pajaknya. Oleh karena itu di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara sendiri sering melakukan pengawasan langsung ke beberapa hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak. Seperti yang disampaikan oleh kepala seksi penagihan Bapak Yunus Sumule, SE (wawancara tanggal 05 September 2016) bahwa :

“karena wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, maka peluang untuk melakukan kecurangan dan memanipulasi pelaporan pajak sangat besar. Oleh sebab itu kami sebagai petugas pajak sering melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang dicurigai pelaporan pajaknya tidak seratus persen 100%. Adapun pengawasan yang kami lakukan yaitu langsung mendatangi hotel, restoran, dan café-café yang dicurigai untuk memeriksa secara langsung laporan pendapatan objek pajak tersebut”<sup>55</sup>

Hal ini diperkuat oleh salah satu pengelola café Bapak Yansi Alfian (wawancara tanggal 05 september 2016) yang membenarkan bahwa petugas pajak

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Yunus Sumule SE. *loc.cit*

memang kadang-kadang melakukan kunjungan langsung ke café yang mereka kelola untuk memastikan bahwa pelaporan pajak yang dilaporkan itu benar-benar sudah 100%.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengurangi kecurangan-kecurangan dari wajib pajak hotel dan restoran dalam hal pelaporan pajak di Kabupaten Toraja Utara maka dilakukan pengawasan dari fiskus pajak sehingga penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara bisa meningkat. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran adalah adanya pengawasan yang ketat dan maksimal.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara yang dilihat dari Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak, Tingkat Intelektualitas Masyarakat, Kualitas Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat. Pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai indikator berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

#### **1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak**

Sehubungan dengan Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak khususnya Pajak Hotel dan Restoran sendiri di Kabupaten Toraja Utara baik Penetapan objek pajak, subjek pajak dan tarif pajak, sudah ditetapkan dengan jelas dalam Undang-

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Yansi Alfian. *loc.cit*

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB II bagian ketujuh dan kedelapan yang juga dijelaskan dalam Perda Kabupaten Toraja Utara No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah BAB II bagian kesatu dan kedua.

Undang-undang tersebut bersifat sederhana, tidak rumit, tidak berbelit-belit dan mudah dimengerti oleh wajib pajak maupun petugas pajak sendiri.

## **2. Tingkat Intelegktualitas Masyarakat**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang telah berubah dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* dimana wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain *Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Oleh sebab itu dalam sistem perpajakan yang seperti ini, secara tidak langsung pemerintah menuntut wajib pajak untuk aktif dalam mengurus dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) dan data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan.

Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assesment System* ini akan berhasil dengan baik jika wajib pajak memiliki intelegktualitas atau tingkat pengetahuan yang baik akan pajak serta disiplin pajak yang tinggi dan pemberlakuan sanksi-

sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak taat pajak. Dengan tingkat intelektual yang cukup baik maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tentunya akan dapat melaksanakan administrasi perpajakan seperti menghitung pajak terutang dan mengisi surat pemberitahuan.

Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiscal. Maka, akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006: 82), ada beberapa ciri-ciri *Self Assesment System*, antara lain:

- a. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- c. Pemerintah, dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, hal 82

### **3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)**

Salah satu misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk dapat meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah dengan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia berupa Kursus-kursus Kepemimpinan, kursus-kursus teknis fungsional dan peningkatan disiplin pegawai terhadap waktu kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kualitas petugas pajak menyangkut *skill* atau kemampuan yang dimiliki petugas pajak baik dari segi intelektual, keterampilan, integritas maupun moral. Kemampuan yang dimiliki oleh petugas pajak sangat mempengaruhi epektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, maka berbagai program dan kegiatan akan dilaksanakan. Diantaranya adalah program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain mengikuti prajabatan, diklat dan training, DISPENDA Toraja Utara juga menyusun program peningkatan SDM yaitu sebagai berikut :

- a. Pelatihan bagi semua petugas PBB dan BPHTB
- b. Workshop, seminar, lokakarya dan studi banding.
- c. Pelatihan profesionalisme bagi petugas pajak dan petugas retribusi daerah.

- d. Pelatihan bagi pengelola keuangan dan aset daerah.<sup>58</sup>

Dengan adanya program peningkatan Sumber Daya Manusia di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara diharapkan dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara sehingga tersedia SDM profesional yang dapat mengelola dan menunjang peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran khususnya peningkatan pajak daerah, sehingga kontribusi pajak daerah terhadap APBD Kabupaten Toraja Utara semakin meningkat.

#### **4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat**

Dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran diperlukan system administrasi yang baik dan tepat. Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang akan diperolehnya melalui pemungutan pajak.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun berbagai program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya program optimalisasi administrasi pemerintahan yaitu:

- a. Pembinaan bagi para pemegang kas
- b. Verifikasi dan penelitian SPJ
- c. Pengendalian dan koordinasi administrasi dalam pelaksanaan APBD

---

<sup>58</sup> DPKKAD.2016.Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD). Kabupaten Toraja Utara, hal 65

- d. Penyusunan dan penerbitan keputusan Bupati tentang bendaharawan penerima, bendaharawan pengeluaran, bendaharawan pembantu, pengelolaan dan penyimpanan barang Daerah dan pemegang kas Daerah.
- e. Penelitian dan pengoreksian SPP, SPMU, Penerbitan SP2D dan penerbitan SKPP
- f. Penelitian/pengoreksian data daftar gaji pengkartuan dan pelaporan realisasi gaji pegawai.
- g. Pengelolaan Dana Peerimbangan Keuangan dan Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
- h. Pengelolaaan dan pengadministrasian keuangan DPPKAD
- i. Perencanaan dan pelaporan
- j. Pengelolaan, penyajian dan pelayanan data
- k. Kompensasi perhitungan PPh 21
- l. Pengelolaan Kepegawaian, arsip dan perpustakaan
- m. Pengelolaan data dan dokumen dari kas daerah.<sup>59</sup>

Selain program optimalisasi administrasi pemerintah, Dispenda juga menyusun program optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu:

- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional
- b. Pengadaan peralatan kantor dan mesin kantor
- c. Pengadaan tanah
- d. Pengadaan moubelair dan perlengkapannya

---

<sup>59</sup> Ibid. p.66



- e. Pengadaan pakaian kerja dan perlengkapannya
- f. Pengelolaan aktiva tetap : Perbaikan/perawatan aktiva tetap dan Penelitian fisik
- g. Penyusunan RKBK/RTBU, RKPBU dan RTPBU
- h. Penghapusan aktiva tetap
- i. Perencanaan keuangan daerah
- j. Pengendalian aset daerah
- k. Pengkajian dan pemanfaatan aset daerah
- l. Penyusunan pedoman pengelolaan barang daerah
- m. Pendistribusian barang daerah
- n. Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah
- o. Penyusunan dan penerbitan buku DPA, buku APBD induk, buku APBD perubahan, dan buku realisasi pelaksanaan APBD
- p. Pendampingan komputerisasi penyusunan RASK melalui program SIMDA
- q. Melaksanakan penyertaan modal saham Pemda pada Bank Sulawesi Selatan.<sup>60</sup>

Dengan adanya program diatas, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara sangat berharap bisa menunjang peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah.

---

<sup>60</sup> Ibid. p.67

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mengenai peraturan-peraturan pajak hotel dan restoran baik itu penetapan objek pajak, subjek pajak, tata cara pemungutan pajak dll, di Kab. Toraja Utara sangat jelas di atur dalam Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Tingkat pengetahuan masyarakat di Kabupaten Toraja Utara akan peraturan-peraturan yang mengatur pajak masih sangat kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari petugas-petugas pajak.
- c. Kualitas aparat pajak di DPPKAD Kabupaten Toraja Utara sudah bisa dikatakan baik dilihat dari Tingkat pendidikan aparat pajak serta pelatihan-pelatihan dan training yang di berikan.
- d. Pengawasan bagi Pajak dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara masih belum maksimal.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti dapat merekomendasikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.

Saran-saran yang di maksud adalah :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja sebaiknya lebih giat lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak untuk menciptakan masyarakat yang taat pajak. Sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.
2. Memperketat pengawasan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Menyempurnakan system dan prosedur pemungutan pajak daerah.

## I. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Jakarta: Kencana.
- Guntur, dkk. 2015. *Prosedur dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Kaho, Riwu J. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi revisi)*. Jakarta: C.V Andi offset.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. 2013. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syekh, Sayid. 2011. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

### Skripsi, Jurnal

- Sumule, Panca Ambawa. 2014. *Peranan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Toraja Utara*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Utomo, Ari. 2013. *Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2011)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Universitas Lampung Bandar Lampung.

Paongan, Ria. 2011. *Optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran kabupaten toraja utara*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar. Universitas Hasanuddin.

### **Sumber Hukum**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut undang-undang KUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

*Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD). 2016. Toraja Utara. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).*

# LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### MATRIKS PENELITIAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Judul	Rumusan Masalah	Fokus	Sub Fokus	Sumber Data	Metode Penelitian
Faktor - Faktor yang Berperan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten	Faktor-faktor apakah yang berperandalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara	Faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.	a. Kejelasan dan Kepatan Peraturan Pajak. b. Tingkat Intelektualitas Masyarakat. c. Kualitas Aparat Pajak (Fiskus) d. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat.	1. Data Primer, berasal dari informan: a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Drs. Firdaus Rin Bata, M.Si) b. Kepala Seksi Penagihan Pajak (Yunus Sumule, SE) c. Staf Bidang Penagihan (Aswin Basridan Hendra S). d. Pemilik Hotel dan Restoran (Yansi Alfian, Neti Latanna dan Ludia Kirung). 2. Data Sekunder	1. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan desain penelitian yaitu kualitatif 2. Peng

Toraja Utara.					umpu lan data dilak ukan melal ui tiga cara yaitu: a. Obse rvasi b. Waw ancar a c. Doku ment asi
------------------	--	--	--	--	---



## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Faktor-faktor yang berperandalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara**

Rumusan Masalah :

Faktor-faktor apakah yang berperandalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara?

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak
  - a. Apa yang anda ketahui tentang penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak?
2. Tingkat Intelegensi Masyarakat
  - a. Apakah anda telah mengenai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Hotel dan Restoran?
  - b. Sejauh ini apakah ada penyampaian/sosialisasi secara langsung dari fiskus kepada wajib pajak (pemilik hotel dan restoran)?
3. Kualitas Petugas Pajak (fiskus)
  - a. Apakah fiskus atau aparat yang bertugas menangani pajak adalah orang yang berkompeten pada bidang perpajakan?
  - b. Apakah fiskus atau aparat pajak disiplin dalam laporan penerimaan dan penagihan pajak?
  - c. Apakah fiskus atau aparat pajak bertanggung jawab terhadap tugasnya?

d. Apakah fiskus atau aparat pajak dalam bertugas bersikap sopan dan ramah dalam bertugas?

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan pajak hotel dan restoran?
- b. Bagaimana prosedur pelaksanaan penerimaan setoran Pajak Hotel dan Restoran ?
- c. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak hotel dan restoran?

### Lampiran 3

#### Matriks Pedoman Wawancara Mengenai Faktor-faktor yang Berperan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Fokus	Sub Fokus	Pertanyaan	Infor man
Faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran	Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak	a. Apa yang anda ketahui tentang penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak?	Aswin Basri Hendra S Yansi Alfian Neti Latan na

			Ludia Kirun g
	Tingkat IntellectualitasMasyaraka t.	<p>a. Apakah data hukum mengenai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Hotel dan Restoran?</p> <p>b. Sejauh ini apakah ada penyampaian/sosialisasi secara langsung dari fiskus kepada wajib pajak (pemilik hotel dan restoran)?</p>	<p>Yansi Alfian Neti Latan na</p> <p>Ludia Kirun g</p>

	Kualitas Aparat Pajak (Fiskus)	<p>a. Apakah fiskus atau aparat yang bertugas menangani pajak adalah orang yang berkompeten pada bidang perpajakan?</p> <p>b. Apakah fiskus atau aparat pajak disiplin dalam pelaporan penentuan dan penagihan pajak?</p> <p>c. Apakah fiskus atau aparat pajak bertanggung jawab terhadap tugasnya?</p> <p>d. Apakah fiskus atau aparat pajak dalam bertugas bersikap sopan dan ramah dalam bertugas?</p>	<p>Drs. Firdaus Rins Bata, M.Si Yunus Sumul e, SE Yansi Alfian Neti Latan na Ludia</p>
--	-----------------------------------	--	--

			Kirun g
	Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat	<p>a. Bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan pajak hotel dan restoran?</p> <p>b. Bagaimana prosedur pelaksanaan penerimaan setoran Pajak Hotel dan Restoran ?</p> <p>c. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak hotel dan restoran?</p>	<p>Drs. Firdau s Rin Bata, M.Si Yunus Sumul e, SE Aswin Basri Hendr a S</p>

--	--	--	--

## Lampiran 4

### DAFTAR NAMA INFORMAN

#### A. Informan Pertama

1. Nama : Drs. Firdaus Rin Bata, M.Si
2. Pekerjaan : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Toraja Utara

#### B. Informan Kedua

1. Nama : Yunus Sumule, SE
2. Pekerjaan : Kepala Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.

#### C. Informan Ketiga

1. Nama : Aswin Basri
2. Pekerjaan : Staf Bidang Penagihan

#### D. Informan Keempat

1. Nama : Hendra S.
2. Pekerjaan : Staf Bidang Penagihan

#### E. Informan Kelima

1. Nama : Yansi Alfian
2. Pekerjaan : Pengelola café



F. Informan Keenam

1. Nama : Neti Latanna
2. Pekerjaan : Pemilik Wisma

G. Informan Ketujuh

1. Nama : Ludia Kirung
2. Pekerjaan : Pengelola Warung

## Lampiran 5

### MATRIKS DATA HASIL WAWANCARA FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

fokus/sub fokus	Pertanyaan	
Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak	a. Apa yang anda ketahui tentang penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak?	<p>Penetapan yang ber...</p> <p>Yang say... dan Retri...</p> <p>sayatida...</p> <p>Untuk ob... Seperti...</p> <p>Sayakur...</p>

		Masalah
Tingkat Intelegktualitas Masyarakat	<p>a. Apakah anda tahu mengenai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Hotel dan Restoran?</p> <p>b. Sejauh ini apakah ada penyampaian/sosialisasi secara langsung dari fiskus kepada wajib pajak (pemilik hotel dan restoran)?</p>	<p>Saya tidak tahu tentang pajak daerah</p> <p>saya tidak tahu jadi saya tidak tetapkan</p> <p>Saya tidak tahu</p> <p>Kalaupun ada</p>

		Yang say Seingats
Kualitas aparat pajak (Fiskus)	<p>a. Apakah fiskus atau aparat yang bertugas menangani pajak adalah orang yang berkompeten pada bidang perpajakan?</p> <p>b. Apakah fiskus atau aparat pajak disiplin dalam pelaporan penerimaan dan penagihan pajak?</p>	Fiskus karena ti pelatih dalam pe

	c. Apakah fiskus atau aparat pajak bertanggung jawab terhadap tugasnya?	<p>Fiskus p orang ya dengan b fiskus Seperti ikutkanla Mereka memilik</p> <p>Yamereh Selainitu Tapikala</p> <p>Soalberk sayatahu Mereka Sayakur</p>
--	---	---

		kepada k
--	--	----------

Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat	a. Bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan pajak hotel dan restoran?	<p>Pelaksanaan belum dilakukan</p> <p>Penagihan telah dilakukan</p> <p>Prosedur</p> <p>Kalaupun</p> <p>Penagihan menung</p> <p>Saya tidak</p> <p>Tapi bias</p>





	<p>c. Bagaimanaprosedurpelaksanaanpengawasanpemungutanpajak hotel danrestoran?</p>	<p>datangla Begitupu seringme berapaju laku di c  Pengawa Jadibias  Yang Sayajug</p>
--	--	--

--	--	--

--	--	--

## Lampiran 6

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi



- tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
  17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
  19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
  20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
  22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
  24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
  26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
  28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
  31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.



35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchtiap hage*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### **Pasal 28**

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

#### **Pasal 29**

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

#### **Pasal 30**

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### **Pasal 31**

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

### **Bagian Ketujuh Pajak Hotel**

#### **Pasal 32**

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **Pasal 33**

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

#### **Pasal 34**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

#### **Pasal 35**

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



#### **Pasal 36**

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

#### **Bagian Kedelapan Pajak Restoran**

#### **Pasal 37**

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 38**

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

#### **Pasal 39**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

#### **Pasal 40**

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 41**

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

#### **Bagian Kesembilan Pajak Hiburan**

#### **Pasal 42**

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA  
UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah serta mewujudkan kemandirian Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Pajak Daerah Kabupaten Toraja Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

**Bagian Kesatu****Pajak Hotel****Pasal 3**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

**Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Pengusaha Hotel.

**Pasal 5**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

#### **Pasal 7**

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi di hotel, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bagi Wajib Pajak Hotel yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (bill), Wajib Pajak Hotel mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## **Bagian Kedua Pajak Restoran**

### **Pasal 10**

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

### **Pasal 11**

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

### **Pasal 12**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

### **Pasal 13**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

### **Pasal 14**



PETA JABATAN  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015

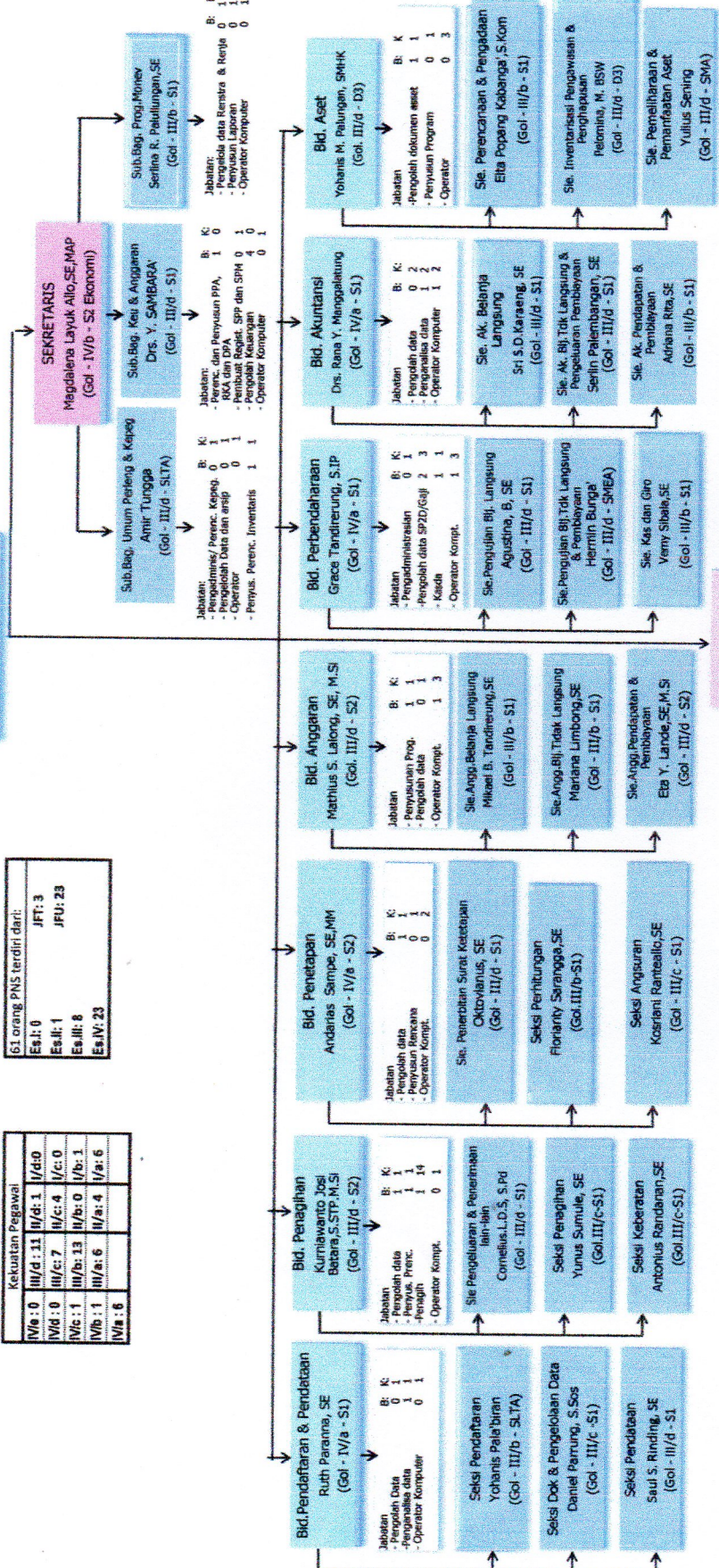
Kekuatan Pegawai			
IV/a : 0	III/d : 11	II/d : 1	I/d : 0
IV/d : 0	III/c : 7	II/c : 4	I/c : 0
IV/c : 1	III/b : 13	II/b : 0	I/b : 1
IV/b : 1	III/a : 6	II/a : 4	I/a : 6
IV/a : 6			

61 orang PNS terdiri dari:	
Es.I : 0	JfT : 3
Es.II : 1	JfU : 23
Es.III : 8	
Es.IV : 23	

KADIS

Firdaus Rin Beta,SE, M.Si  
(Gol - IV/c - S2 Ekonomi)

Lampiran 7



Kepala Pasar  
Tenaga Admin : 3 org

Mengetahui,  
Kepala DPPKAD

## Lampiran 8

**Tabel 7. Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kabupaten Toraja Utara, 2011-2015**

Tahun	Hotel					Akomodasi Lainnya
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	
2011	8	-	3	2	-	20
2012	8	-	3	2	-	20
2013	6	-	3	2	-	27
2014	6	-	3	2	-	29
2015	8	-	3	2	-	24

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

### Lampiran 9

#### DAFTAR HOTEL/WISMA DI KABUPATEN TORAJA UTARA

NO	NAMA OBJEK PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	KLASIFIKASI OBJEK PAJAK
1.	Hotel Heritage	Jl. Kete' Kesu'	Bintang IV
2.	Hotel Marante	Jl. Poros Palopo	Bintang IV
3.	Hotel Misliana	Jl. Poros Makale Rantepao	Bintang III
4.	Hotel Toraja Prince	Jl. Poros Palopo	Bintang III
5.	Hotel Luta	Jl. Sam Ratulangi	Bintang III
6.	Rantepao Lodge	Jl. Pao Rura	Bintang II
7.	Hotel Niel	Jl. Poros Makale	Bintang II
8.	Hotel Torsina	Jl. Pao Rura	Bintang I
9.	Hotel Indra	Jl. Landorundun	Bintang I
10.	Hotel Hiltra	Jl. Pramuka No. 70	Bintang I
11.	Hotel Pison	Jl. Pongtiku Rantepao	Bintang I
12.	Hotel Mandarana	Jl. Sa'dan Tallunglipu	Bintang I
13.	Hotel Popies	Jl. Pongtiku Rantepao	Melati III
14.	Wisma Maria I	Jl. Sam Ratulangi	Melati III
15.	Wisma Tanabua	Jl. Diponegoro	Melati III
16.	Duta 88 Cotage	Jl. Sawerigading	Melati III
17.	Wisma Monton	Jl. A. Gani	Melati III
18.	Wisma Irama	Jl. A. Gani	Melati III



19.	Wisma Kambuno	Jl. Poros Palopo No 23	Melati III
20.	Hotel Bobatu Hera	Jl. Poros Sa'dan	Melati III
21.	Wisma Thebass	Jl. Mangadil No. 14	Melati II
22.	Hotel Nonongan	Alang-alang Sopai	Melati II
23.	Hotel Marlin	Jl. A. Mappayuki	Melati II
24.	Wisma Pola	Jl. Pembangunan	Melati II
25.	Pondok Nilam	Jl. Mongonsidi	Melati II
26.	Pondok Pelangi	Jl. Pembangunan No. 11	Melati I
27.	Wisma Sarla	Jl. A. Mappanyuki	Melati I
28.	Wisma Imanuel	Jl. Imanuel	Melati I
29.	Wisma Monika	Jl. Sam Ratulangi	Melati I
30.	Hotel Toraja Palma	Jl. Poros Palopo	Melati I
31.	Wisma Malita	Jl. Tikala Tallunglipu	Melati I
32.	Home Stay Mentirotik	Lemb. Sesean Matallo	Melati I
33.	Home Stay Panorama	Jl. Pembangunan No 29	Melati I
34.	Wisma Tengkosituru	Jl. Tengkosituru' No. 5	Melati I
35.	Wisma Wisata	Jl. Suloara' No. 11	Melati I
36.	Home Stay Riana	Jl. Abd. Gani	Melati I
37.	Wisma Mappanyuki	Jl. Mappanyuki	Melati I
<b>Jumlah</b>			<b>37</b>

Sumber :DinasPendapatanPengelolaanKeuangandanAset Daerah Kab. Toraja Utara

## Lampiran10

**Tabel 8. Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel dan Bulan di Kabupaten Toraja Utara, 2015**

<b>Bulan</b>	<b>Hotel Berbintang</b>	<b>Non Berbintang</b>
Januari	5,47	8,33
Februari	5,45	7,11
Maret	7,27	7,09
April	7,76	6,48
Mei	9,38	7,51
Juni	8,19	6,34
Juli	11,69	8,92
Agustus	13,64	10,08
September	7,47	8,88
Oktober	8,28	8,74
November	7,28	9,33
Desember	8,10	11,20
<b>Jumlah/Total</b>	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

**Lampiran11**

**DAFTAR RESTORAN/ CAFÉ/ RUMAH MAKAN DI KABUPATEN  
TORAJA UTARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA OBJEK PAJAK</b>
1.	Restoran Ayam Penyet Ria
2.	Restoran Celebes
3.	Restoran Dapota
4.	Restoran Dsher
5.	Restoran Mambo
6.	Restoran Pizza Kinaya
7.	Restoran RFC
8.	Restoran Rimiko
9.	Restoran Rahmat
10.	Restoran Saruran
11.	Café Aras
12.	Café Bua Indah
13.	Café Buntu Elo'
14.	Café Carappe
15.	Café D'Brothers
16.	Café Delviero
17.	Café Donald
18.	Café Flamboyan

19.	Café Indah
20.	Café Induk
21.	Café Kaltim
22.	Café Kristo
23.	Café Lebon
24.	Café Pondok Ikan
25.	Café Rama
26.	Café Randanan
27.	Café Rumto
28.	Café Samudra
29.	Café Sangrapuan
30.	Café sofian
31.	Rumah Bernyayi IAC
32.	R.M. Alfa Bakso
33.	R.M. Bakso Babi Pak Daud
34.	R.M. Bakso Kios Duta
35.	R.M. Bakso Mama Risal
36.	R.M. Cici Kantin
37.	R.M. Kapurung Bolu
38.	R.M. Marano
39.	R.M. Mauren
40.	R.M. Merdeka

41.	R.M. Mie Gentong
42.	R.M. Monica
43.	R.M. Perdana
44.	R.M. Sehati
<b>Jumlah 44</b>	

Sumber :DinasPendapatanPengelolaanKeuangandanAset Daerah Kab. Toraja Utara



## Lampiran 12

## Contoh SPTPD Hotel dan Restoran Kabupaten Toraja Utara

Lampiran : **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah  
(SPTPD – Hotel dan Restoran)**

Masa Pajak : **AGUSTUS 2016**

Jenis Penerimaan

No.	Uraian Obyek	Omset	Tax (Pajak)	Keterangan
1.	<b>Fasilitas Penginapan</b>			
		483,800,000	48,380,000	
2.	<b>Fasilitas Penunjang</b>			
	- Telepon	Rp.		
	- Laundry	Rp. 6.680,500	668,050	
	- Seterika	Rp.		
	- Taxi/angkutan yang disediakan untuk disewakan	Rp.		
	- Foto Copy	Rp.		
	- Telex	Rp.		
	- Faximile	Rp.		
3.	<b>Fasilitas Olah Raga dan Hiburan</b>			
	- Kolam Renang	Rp. 12,119,850	1,211,985	
	- Karaoke	Rp.		
	- Pub / Diskotik	Rp.		
	- Tennis	Rp.		
	- Fitnes	Rp.		
	- Golf	Rp.		
4.	<b>Persewaan Ruangan</b>			
	- Perkawinan	Rp. 25,000,000	2,500,000	
	- Pertemuan Rapat	Rp.		
5.	<b>Penjualan Makanan dan Minuman (Restoran)</b>			
	- Bar	Rp. 308,650,000	30,865,000	
		836,250,350	83,625,035	

Petugas Hotel,  
836,250,350  
Pengawal Dipenda,  
83,625,035

MRA

<b>PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Dr. Sam Ratulangi No.72 Rantepao	No. SPTPD : ..... Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....
--	--

**SPTPD**  
**(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)**  
**PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

N. P. W. P. D. Kepada Yth.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
.....  
di .....

**PERHATIAN :**

- Harap diisi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK.
- Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat ..... paling lambat pada tanggal ..... (Official Assesment)
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda, untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

**A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL**

1. Golongan Hotel ☐ ☐
01. Bintang lima
06. Melati tiga  
02. Bintang empat
07. Melati dua  
03. Bintang tiga
08. Melati satu  
04. Bintang dua
09. Ekonomi  
05. Bintang satu
10. Lainnya : .....

2. Tarif Jumlah Kamar Hotel :

No.	Golongan Kamar	Tarif (Rp.)	Jumlah Kamar
1.	Single	450.000	40
2.	Double	450.000	462
3.	Triple	500.000	32

3. Menggunakan Kas Register ☐
1. Ya
2. Tidak
2

4. Mengadakan Pembukuan / Pencatatan ☐
1. Ya
2. Tidak

**B. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL SELF ASSESMENT**

1. Jumlah pembayaran dan Pajak Terhutang untuk masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu.

- Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
- Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. ....
- Tarif Pajak (sesuai Perda) : ..... %
- Pajak Terhutang (b x c) : Rp. ....

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen):

- Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
- Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. ....
- Tarif Pajak (sesuai Perda) : ..... %
- Pajak Terhutang (b x c) : Rp. ....



### C. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL OFFICIAL ASSESMENT

- a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
- b. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. ....

### D. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

#### 1. Restoran

No.	Meja yang tersedia	Jumlah Kursi	Jumlah Pengunjung rata-rata per hari

2. Menggunakan Kas Register ☐ 1. Ya  
2. Tidak
3. Mengadakan Pembukuan / Pencatatan ☐ 1. Ya  
2. Tidak

### E. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSESMENT

#### 3. Jumlah pembayaran dan Pajak Terhutang untuk masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu.

- e. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
- f. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. ....
- g. Tarif Pajak (sesuai Perda) : ..... %
- h. Pajak Terhutang (b x c) : Rp. ....

#### 4. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen):

- e. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
- f. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. ....
- g. Tarif Pajak (sesuai Perda) : ..... %
- h. Pajak Terhutang (b x c) : Rp. ....

### F. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN OFFICIAL ASSESMENT

- a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
- b. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. ....

**G. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sangsi-sangsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

..... tgl ..... tahun .....



Wajib Pajak,

Nama Jelas

**H. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA**

Tata Cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki

- ☐ 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda)  
 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan Pajak sendiri)

Diterima Tanggal : 7-9-2016

Nama Petugas : Y. Palsu

NIP : \_\_\_\_\_

*(Signature)*

Model DPA - 02A

halaman tiga dari tiga halaman

gunting disini

No. SPTPD : .....

**TANDA TERIMA**

NPWPD : .....

Nama : .....

Alamat : .....

..... tgl ..... tahun .....

Yang Menerima,

## Lampiran 13



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
Alamat. Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105  
Website : <http://ian.unm.ac.id>

## USUL PROPOSAL PENELITIAN/PENULISAN SKRIPSI

## A. IDENTITAS

1. Nama : Citra Fani
2. Tempat/Tgl Lahir : Rorre, 16 Februari 1995
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265141007
4. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
5. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

## B. FOKUS PENELITIAN

- ☐ Kebijakan Publik
- ☐ Pelayanan Publik
- ☒ Administrasi Pembangunan

## C. JUDUL SKRIPSI YANG DIUSULKAN

1. Efektifitas Pemungutan Retribusi 12in trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja ?
2. Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Toraja Utara
3. Analisis Tingkat Kepuasan Pasien dan Keluarga Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Laki-laki Kabupaten Tana Toraja

Makassar, 13 Mei 2015

Diketahui Oleh:

Penasehat Akademik,

Mahasiswa yang bersangkutan

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si  
NIP. 19601231 198803 1 011

Citra Fani  
NIM. 1265141007

P<sub>2</sub> = Ismail. SPd, M.Si 4/5 2015.

## Lampiran 14



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
Alamat. Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105  
Website : <http://ian.unm.ac.id>

## PERSETUJUAN JUDUL DAN CALON PEMBIMBING

## A. IDENTITAS

1. Nama : CITRA FANI
2. Tempat/Tgl Lahir : PORRE, 16 FEBRUARI 1995
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265141007
4. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

## B. JUDUK SKRIPSI YANG DISETUJUI

Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan <sup>?</sup> Pajak Restoran  
di Kabupaten Toraja Utara.

## C. PEMBIMBING YANG DITUNJUK


No.	Nama Pembimbing/NIP	Tanda Tangan
1	Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si NIP. 19601231 1988031 011	
2	Ismail. S. Pd., M.Si NIP. 19790909 2010121 004	

Makassar, 25 Mei 2015


Ketua Program Studi  
Ilmu Adm. Negara FIS UNM

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si  
NIP. 19601231 198803 1 011

## Lampiran 15

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL</b> Jalan : A.P. Pettarani Makassar Laman : <a href="mailto:FIS_UNM@unm.ac.id">FIS_UNM@unm.ac.id</a>	
Nomor : 4660/UN36.6/DL/2016	16 Agustus 2016	
Lamp. : -		
Hal : Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing		
Yth. : Sdr. <b>Citra Fani</b> di Makassar	Stambuk : 1265141007	
<p>Berdasarkan surat permohonan Saudara tertanggal 16 Agustus 2016 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat ini, maka dengan ini disampaikan dengan hormat kepada Saudara bahwa rencana skripsi berjudul:</p> <p><b>Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara.</b></p> <p>Dosen Pembimbing :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. <u>Muhammad Guntur</u>, M.Si.</li> <li>2. Ismail, S.Pd, M.Si.</li> </ol> <p>Dapat disetujui dan dinyatakan SAH.</p> <p>Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipergunakan seperlunya.</p>		
<div style="text-align: center;">  <p>Dr. <u>Etiyanti Umar</u>, M.Hum. NIP. 196108171988031002</p> </div>		
Tembusan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan (sebagai laporan)</li> <li>2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara</li> </ol>		

## Lampiran 16

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	
	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	
	FAKULTAS ILMU SOSIAL	
	Jalan : A.P. Pettarani Makassar Laman : <a href="mailto:FIS_UNM@unm.ac.id">FIS_UNM@unm.ac.id</a>	

---

Nomor : 4661/UN36.6/PI/2016 16 Agustus 2016

Lamp. : -

Hal : Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. : **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

Dimohon dengan hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini, dapat diberikan izin mengadakan penelitian di: **Kabupaten Toraja Utara** dalam rangka penulisan skripsi.

Nama : **Citra Fani**  
Stambuk : 1265141007  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si.
2. Ismail, S.Pd, M.Si.

Masalah yang diteliti :

**Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara.**

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

  
 Dr. Fisman Umar, M.Hum.  
 NIP. 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara



## Lampiran 17



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
 ( UPT - P2T )

Nomor : 11717/S.01P/P2T/08/2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Bupati Toraja Utara

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ilmu Sosial UNM Makassar Nomor : 4661/UN36.6/PI/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **CITRA FANI**  
 Nomor Pokok : 1265141007  
 Program Studi : Ilmu Adm. Negara  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. A.P Pettarani Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Agustus s/d 25 September 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 22 Agustus 2016



**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ilmu Sosial UNM Makassar;
2. Pertiagal.

## Lampiran 18

 <p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA</b>  <b>KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</b>          Alamat: Jl. Kartika Tlp. 082188023379 Rantepao</p>	
<p><b><u>REKOMENDASI</u></b>          Nomor :224/SRP/KPPTSP/VIII/2016</p>	
<p>Menunjuk Surat Kepala Badan Koordinasi Pelayanan Modal Daerah UPT-P2T Nomor : 11717/S.01P/P2T/08/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 perihal <b>Permohonan Penelitian</b>, dengan ini disampaikan bahwa :</p>	
Nama	: Citra Fani
Nomor Pokok	: 1265141007
Program Studi	: Ilmu Adm. Negara
<p>Bermaksud mengadakan <b>Pengumpulan Data dan Penelitian</b> dalam rangka penulisan skripsi dengan judul : <b>"FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA"</b>.</p>	
<p>Yang dilaksanakan tmt <b>30 Agustus 2016 s/d 25 September 2016</b>.</p>	
<p>Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri kepada Bupati Toraja Utara up. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>2. <b>Pengambilan Data dan Penelitian</b> tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.</li> <li>3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.</li> <li>4. Menyerahkan 1 ( satu ) berkas <i>copy</i> hasil "<b>Pengambilan Data Penelitian</b>" kepada Bupati Toraja Utara up. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.</li> </ol>	
<p>Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p align="right">Rantepao, 30 Agustus 2016</p>	
<p align="right">A.A BUPATI TORAJA UTARA          KEPALA KANTOR,</p>	
<p align="right">   <b>ONESIMUS S. SAMPELIMBONG, SE</b>          NIP. 196309151994031004       </p>	
<p>Tembusan disampaikan kepada Yth :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Toraja Utara ( sebagai laporan ),di Rantepao;</li> <li>2. Dan-Dim 1414 Tana Toraja, di Rantepao;</li> <li>3. Kapolres Tana Toraja, di Makale;</li> <li>4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Toraja Utara, di Panga';</li> <li>5. Kepala DPPKAD Toraja Utara, di Rantepao;</li> <li>6. Saudara yang Bersangkutan;</li> <li>7. Pertiinggal.</li> </ol>	



## Lampiran 19



# PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

## DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Alamat: Jl. Dr. Sam Ratulangi Nomor 72 Rantepao - Toraja Utara

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 900.970/DPPKAD/ /IX/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara menerangkan bahwa:

N a m a : **CITRA FANI**  
 Stambuk : 1265141007  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Fakultas : Univ. Negeri Makassar – Fak. Ilmu Sosial

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara selama 19 (Sembilan Belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal 30 Agustus s/d 25 September 2016 dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul: ***“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA”***.

Rantepao, 26 September 2016  
Kepala DPPKAD,

**Drs. Firdaus Rin Bata, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 N I P : 19630217 198903 1 013

**Lampiran 20****DOKUMENTASI**

Proses Penagihan Pajak bersama Petugas Pemungut Pajak di Hotel Misiliana di Kabupaten Toraja Utara.



Petugas Pajak dan Wajib Pajak menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD-Hotel dan Restoran).

[illegible]

## Papan Informasi di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Retribusi





Wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan dan Staf Bidang Penagihan



Wawancara dengan salah satu wajib Pajak Bapak Yansi Alfisan pengelola cafe

**Lampiran 13****RIWAYAT HIDUP.**

**Citra Fani**, lahir pada tanggal 16 Februari 1995 di Rorre , Kabupaten Tana Toraja. Putri dari pasangan Lewi Sule dan Ludia Kala' Tiku. Anak ke delapan dari sepuluh bersaudara. Pada tahun 2000 penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 117 Rorre dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Makale dan tamat pada tahun 2009. Lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Makale dan tamat pada tahun 2012 kemudian pada tahun itu juga, penulis lulus dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.